

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJMN. RPJMD sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Bersamaan dengan proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan setiap tahun juga menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah menggambarkan Tujuan Jangka Panjang, Strategis-strategis, Sasaran Tahunan dan Indikator Kinerja Sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan kerangka acuan untuk Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan. Rencana strategis merupakan pedoman Umum dan Jangka Panjang, sedangkan Rencana Kinerja merupakan dokumen yang lebih detail dan terfokus setiap tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tidak terlepas dari system penganggaran dari suatu unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan Sasaran dan Tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran dan ketersediaan anggaran.

Pada anggaran suatu unit organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, sehingga Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Rencana Kerja (Renja) ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025, disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan (1 tahun), yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah. Renja ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan pada tahap berikutnya RKA tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1. 2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak ini dimaksud untuk :

- a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan 2025 serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;
- b. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dengan RPJMD Kabupaten Demak;

- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Kabupaten Demak selama 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek tahunan.
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam periode 1 (satu) tahun;
- c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Demak;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1. 4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja PD.

- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2023.
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Memuat tentang tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta kerangka pendanaannya.
- BAB V Penutup
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Penanaman Modal dengan tujuan meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN dan sasaran meningkatnya pencapaian prosentase realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2023 bersumber dari Dana Alokasi Umum, yaitu APBD serta mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal.

Pada tahun 2023 anggaran murni sebesar Rp6.476.999.980,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), setelah perubahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp(731.118.980,00) (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratusdelapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah). Sehingga anggaran perubahan menjadi sebesar Rp5.744.881.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Demak sebesar Rp5.431.881.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah). Adapun realisasi capaian program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator kinerja Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar dari target 6.650 ditetapkan tercapai 4.839 ditetapkan atau 72,77%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja Jumlah ditetapkan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar dari target 6.650 ditetapkan tercapai 4.839

ketetapan atau 72,77% dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dimana ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja, yaitu :

- a). Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dari target 6.650 ketetapan tercapai 4.839 ketetapan atau 72,77%;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 2 (dua) indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100% tercapai 100% dan Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target 100% tercapai 100%. Pada Program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang tercapai 100% dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Dimana ada 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja yang mencapai 100%.
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator kinerja. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja tercapai 100% dan 2 (dua) sub kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja tercapai 100%.
 - c. Program Promosi Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator kinerja. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja tercapai 100% dan 1 (satu) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja tercapai 100%.
 3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 2 (dua) indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100% tercapai 100% dan Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target 100% tercapai 100%. Pada Program ini terdapat 8 (delapan)

kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Dimana ada 1 (satu) indikator kinerja Jumlah barang milik daerah yang terpelihara mencapai 109,09% dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Dimana ada 1 (satu) indikator kinerja Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan yang mencapai 130%.

- b. Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dimana ada 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target kinerja, yaitu (1) Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal dengan target 50 kegiatan usaha tercapai 51 kegiatan usaha atau 102% dan (2) Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dengan target 5 orang tercapai 17 orang atau 340%.
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator kinerja Jumlah investor (PMDN/PMA) dari target 450 proyek terealisasi 1.676 proyek atau 372,44%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 8% tercapai 33% dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang melebihi target kinerja, Yaitu :
 - a). Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 25 kegiatan usaha tercapai 26 kegiatan usaha (104%);
 - b). Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 200 pelaku usaha tercapai 320 pelaku usaha atau 160%.

- c). Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dengan target 125 kegiatan usaha tercapai 255 kegiatan usaha atau 204%.
 - d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator kinerja Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial dengan target 300 data tercapai 359 data atau 119,67%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia dengan target 102 data tercapai 384 data atau 376,47% dan 1 (satu) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target 102 data tercapai 384 data atau 376,47%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.
- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :
 - b. Indikator kinerja Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar dari target 6.650 ketetapan tercapai 4.839 ketetapan atau 72,77% tidak tercapai. Hal ini dikarenakan adanya peraturan perizinan yang berubah terkait OSS RBA.
 - c. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dari target 6.650 ketetapan tercapai 4.839 ketetapan atau 72,77% tidak tercapai. Hal ini dikarenakan adanya peraturan perizinan yang berubah terkait OSS RBA.;
 - d. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Terpenuhinya ketersediaan anggaran;
 - b) Komitmen bersama untuk mencapai target yang telah ditentukan;
 - c) Koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua bidang dan sekretariat.

- e. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan yang mencapai 130%. Hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang mencukupi dan adanya pergeseran anggaran;
 - b. Jumlah barang milik daerah yang terpelihara mencapai 109,09%. Hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang mencukupi dan adanya pergeseran anggaran;
 - c. Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal dengan target 50 kegiatan usaha tercapai 51 kegiatan usaha atau 102%. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan usaha yang perlu dilakukan pemantauan pemenuhan komitmen.
 - d. Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan mencapai 340%. Hal ini dikarenakan banyak pelaku usaha yang melakukan konsultasi perizinan.
 - e. Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 8% tercapai 33%. Hal ini dikarenakan kegiatan pengendalian kepada pelaku usaha dengan memberdayakan semua sumber daya manusia yang tersedia dan adanya dukungan anggaran dari DAK Non Fisik.
 - f. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 25 kegiatan usaha tercapai 26 kegiatan usaha (104%). Hal ini dikarenakan kegiatan pengendalian kepada pelaku usaha dengan memberdayakan semua sumber daya manusia yang tersedia.
 - g. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 200 pelaku usaha tercapai 320 pelaku usaha atau 160%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan anggaran dari DAK non Fisik, sehingga kegiatan pembinaan lebih banyak.

- h. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dengan target 125 kegiatan usaha tercapai 255 kegiatan usaha atau 204%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan anggaran dari DAK non Fisik, sehingga kegiatan pengawasan lebih banyak.
 - i. Indikator kinerja Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial dengan target 300 data tercapai 359 data atau 119,67%. Hal ini dikarenakan pemanfaatan media sebagai sarana informasi yang baik.
 - j. Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia dengan target 102 data tercapai 384 data atau 376,47%. Hal ini dikarenakan optimalisasi pengelolaan dan penyajian data yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Dengan tercapainya program pada Tahun 2023 yaitu 2 (dua) program telah memenuhi target, 1 (satu) program belum memenuhi target, 3 (tiga) program telah melebihi target kinerja, maka implikasi yang timbul adalah tersedianya pedoman perencanaan tahun berikutnya.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a) Perencanaan anggaran diharapkan lebih efisien dan efektif berdasarkan kinerja.
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s.d tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Demak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Target Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s.d Tahun 2024				
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat realisasi Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18	Penanaman Modal											
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%			
2	18			Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%			
2	18	01	2, 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah (dokumen)	32	8	8	100,00%	8	16	50,00%	
2	18	01	2, 0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	1	1	100,00%	1	2	50,00%
2	18	01	2	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	8	2	2	100,00%	2	4	50,00%
2	18	01	2	00 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen)	8	2	2	100,00%	2	4	50,00%

2	18	01	2	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12		3	3	100,00%	3	6	50,00%
2	18	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (dokumen)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
2	18	01	2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	138	26	25	25	100,00%	25	76	55,07%
2	18	01	2	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	55	11	11	11	100,00%	11	33	60,00%
2	18	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah yang sudah direkonsiliasi (laporan)	8		2	2	100,00%	2	4	50,00%
2	18	01	2	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	8		2	2	100,00%	2	4	50,00%
2	18	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	3	100,00%
2	18	01	2	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
2	18	01	2	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	40	40	36	36	100,00%	37	113	282,50%
2	18	01	2	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	200	0	-	-	100,00%	50	50	25,00%
2	18	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

2	18	01	2	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
2	18	01	2	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
2	18	01	2	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
2	18	01	2	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
2	18	01	2	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	138	24	24	24	100,00%	24	72	52,17%
2	18	01	2	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh (laporan)	5	0	1	1	100,00%	1	2	40,00%
2	18	01	2	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	635	110	110	110	100,00%	110	330	51,97%
2	18	01	2	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	21.000	4000	4.000	4.000	100,00%	4.000	12.000	57,14%
2	18	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	60	4	12	12	100,00%	12	28	46,67%
2	18	01	2	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)	10	2	-	-	100,00%	-	2	20,00%
2	18	01	2	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	45	95	4	4	100,00%	-	99	220,00%
2	18	01	2	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	30	41	10	13	130,00%	-	54	180,00%
2	18	01	2	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	9	2	-	-	-	-	2	22,22%

2	18	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
2	18	01	2	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60,00%
2	18	01	2	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	60	12	12	12	100,00%	12	36	60,00%
2	18	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)	340	1	66	72	109,09%	71	144	42,35%
2	18	01	2	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
2	18	01	2	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	20	16	19	19	100,00%	20	55	275,00%
2	18	01	2	00 05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	190		40	40	100,00%	50	90	47,37%
2	18	01	2	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (unit)	1		1	1	100,00%	1	2	200,00%
2	18	01	2	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	20		1	1	100,00%	5	6	30,00%
2	18	01	2	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	47	45	8	8	100,00%	-	53	112,77%

2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar (ketetapan)	33.750	6.324	6.650	4.839	72,77%	6.750	17.913	53,08%
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar (ketetapan)	33.750	6.324	6.650	4.839	72,77%	6.750	17.913	53,08%
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)	33.750	6.324	6.650	4.839	72,77%	6.750	17.913	53,08%
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal (kegiatan usaha)	205	53	50	51	102,00%	40	144	70,24%
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan (orang)	25	4	5	17	340,00%	5	26	104,00%
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rp5.260.000.000.000	Rp3.097.623.470.000	Rp3.200.000.000.000	Rp3.512.084.680.000	109,75%	Rp3.200.000.000.000	Rp9.809.708.150.000	186,50%
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi investasi yang diterbitkan (buku)	870	174	174	174	100,00%	174	522	60,00%
2	18	02	2.02	01	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/ kota (dokumen)	1	0	1	1	100,00%	-	1	100,00%

2	18	02	2 0 2	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (dokumen)	870	174	174	174	100,00%	174	522	60,00%	
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Rasio promosi terhadap jumlah investor	0,57	0,39	0,66	0,18	368,72%	0,64	0,18	357,55%	
2	18	03	2. 0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan (laporan)	14	2	3	3	100,00%	3	8	57,14%	
2	18	03	2. 0 1	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	14	2	3	3	100,00%	3	8	57,14%	
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor (PMDN/PMA) (investor)	2.375	519	450	1.676	372,44%	1.750	2.665	112,21%	
2	18	05	2. 0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	11%	14%	8%	33	41475,00%	9,00%	33	%	30370,67
2	18	05	2 0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	175	26	25	26	104,00%	25	77	44,00%	
2	18	05	2 0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (pelaku usaha)	10.000	450	200	320	160,00%	200	970	9,70%	
2	18	05	2 0 1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (kegiatan usaha)	325	50	125	255	204,00%	50	355	109,23%	
2	18	06			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial (data)	1.500	386	300	359	119,67%	300	1.045	69,67%	

2	18	06	2. 0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia (data)	510	125	300	384	128,00%	300	809	158,63%
2	18	06	2 0 1	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	510	125	102	384	376,47%	102	611	119,80%

Tabel 2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi / Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Rens tra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan Realisasi s.d 2024		Kode Subkegiatan
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Target		Realisasi		Tingkat Realisasi		Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
								Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
2	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'																	
f	Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik	unit	n/a		-	975.893.700	22	-	30	-	136,36		30	-	60	975.893.700	
1	Koordinasi dan Monev MPP	Jumlah kegiatan koordinasi dan monev MPP	kegiatan	n/a		3	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	100,00	100,00	2	10.000.000	9	50.000.000	2.18.01.2.06.09
2	Pengadaan mebelair MPP	Jumlah mebelair	Paket	n/a		1	195.326.700	-	-	-	-	-	-	-	-	1	195.326.700	2.18.01.2.07.05
3	Pengadaan peralatan MPP	Jumlah peralatan	Unit	n/a		47	760.567.000	-	-	-	-	-	-	-	-	47	760.567.000	2.18.01.2.07.06

8	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT																		
a	Peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi	%	0,22		0,09	209.863.200	0,03	244.794.000	2,23	237.953.347	7.433,33	97,21	0,04	263.954.000	0,04	711.770.547		
1	Promosi investasi	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi	laporan	3		2	85.448.700	3	105.344.000	3	108.757.547	100,00	103,24	3	98.150.000	8	292.356.247	2.18.03.2.01.02	
2	Insentif investasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	Kegiatan Usaha	n/a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18.02.2.01.02
3	Monitoring dan evaluasi investasi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan monev	Pelaku usaha	100		250	124.414.500	250	139.450.000	255	129.195.800,0	102,00	92,65	250	165.804.000	755	419.414.300	2.18.03.2.01.03	
g	Kemudahan perizinan usaha mikro	Persentase pengajuan izin usaha mikro yang diterbitkan	%	n/a		100	106.359.500	90	103.620.000	100	105.922.500,0	111,11	102,22	90	177.329.500	290	389.611.500		
1	Sosialisasi perizinan usaha mikro	jumlah pelaku UMK yang mendapatkan sosialisasi	UMK	35		225	106.359.500	100	103.620.000	120	105.922.500,0	120,00	102,22	100	177.329.500	445	389.611.500	2.18.02.2.01.02	

Dari tabel diatas diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program prioritas sebagai berikut :

- a). Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis “Smart City”. Dengan rencana implementasi Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan indikator Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik dari target 22 unit tercapai 30 atau 136,36%. Pada Implementasi ini dengan dukungan kegiatan :
 1. Koordinasi dan Monev MPP dengan indikator Jumlah kegiatan koordinasi dan monev MPP dari target 4 (empat) kegiatan tercapai 4 (empat) kegiatan atau 100%;
 2. Pengadaan mebelair MPP dengan indikator Jumlah mebeler pada tahun 2023 tidak ada target;
 3. Pengadaan peralatan MPP dengan indikator Jumlah peralatan pada tahun 2025 tidak ada target;
- b). Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat. Dengan 2 (dua) rencana implementasi :
 - a. Peningkatan investasi dengan indikator Persentase peningkatan investasi dari target 0,03 tercapai 2,23 atau 7.433,33%, dengan dukungan kegiatan :
 1. Promosi investasi dengan indikator Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi dari target 3 tercapai 3 atau 100%;
 2. Insentif investasi dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha tidak ada target;
 3. Monitoring dan evaluasi investasi dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan monev dari target 250 tercapai 255 atau 102%;
 - b. Kemudahan perizinan usaha mikro dengan indikator Persentase pengajuan izin usaha mikro yang diterbitkan dari target 90% tercapai 100% atau 111,11% , dengan dukungan kegiatan :
 1. Sosialisasi perizinan usaha mikro dengan indikator jumlah pelaku UMK yang mendapatkan sosialisasi dari target 100 tercapai 120 atau 120%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka urusan penanaman modal merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang tidak termasuk didalam pelayanan dasar dalam stándar pelayanan minimal.

Berdasarkan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak 2021-2026, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal, pada tahun 2021 terealisasi 85 atau 100%, pada tahun 2022 terealisasi 89,84 atau 105,69% dan pada tahun 2023 terealisasi 90,75 atau 104,31% mengalami peningkatan sebesar 0,91 atau 1,01%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pelayanan perizinan secara online.
2. Indikator kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, pada tahun 2021 terealisasi 80%, pada tahun 2022 terealisasi 100%, dan pada tahun 2023 terealisasi 100% sama dengan realisasi tahun 2022. Pada tahun 2023 semua keluhan masyarakat telah ditindaklanjuti.
3. Indikator Kinerja nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 terealisasi 80,88, pada tahun 2022 realisasi 80,36 atau 99,33%, mengalami penurunan sebesar 0,52. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan dalam bobot penilaian dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan oleh APIP. Pada tahun 2023 terealisasi 81,36 atau 100,53% meningkat 1 dibandingkan realisasi tahun 2022.

4. Indikator Kinerja Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021 terealisasi 88%, pada tahun 2022 realisasi 100% dari target 100%, dan pada tahun 2023 realisasi sebesar 100% dari target 100%. Semua indikator kinerja sasaran strategis telah mencapai target.
5. Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan Berusaha pada tahun 2021 terealisasi 3 hari dengan capaian 100% dari target 3 hari, pada tahun 2022 terealisasi 3 hari dengan capaian 100% dari target 3 hari dan pada tahun 2023 terealisasi 3 hari dengan capaian 100% dari target 3 hari. Hal ini antara lain karena proses pelayanan perizinan telah menggunakan teknologi informasi secara online.
6. Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA tahun 2021 terealisasi 573 proyek, pada tahun 2022 terealisasi 519 proyek dengan capaian 119,31% dari target 435 proyek, dan pada tahun 2023 terealisasi 1.676 proyek atau 372,44% dari target 450 proyek. Hal ini antara lain karena optimalisasi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
7. Persentase Peningkatan Investasi pada tahun 2021 terealisasi 0,01%, pada tahun 2022 terealisasi 0,20%, dan pada tahun 2023 terealisasi 2,23% meningkat 2,03%. Adapun Persentase peningkatan investasi menggunakan rumus jumlah proyek tahun n dikurangi jumlah proyek tahun n-1 dibagi jumlah proyek tahun n-1 dikalikan 100% $((1.676-519)/519*100\%) = 2,23\%$.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	V			85	87	89	91	89,84	90,75	91	91,4	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Perempan RB No.14 Tahun 2017. Formulasi perhitungan IKM yaitu Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V			80	83	86	90	100	100	86	90	Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh keluhan masyarakat yang masuk dikalikan seratus persen
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	V			80,9	80,93	80,96	80,99	80,36	81,36	81,4	81,5	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	V			100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran strategis dikalikan seratus persen
5	Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	V			3	3	3	2	3	3	1	1	Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin dibagi jumlah izin yang terbit
6	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	V			435	450	470	495	519	1.676	1.750	1.760	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA tahun n
7	Persentase Peningkatan Investasi	V		V	0,02	0,03	0,04	0,05	0,20	2,23	0,04	0,05	Jumlah proyek investasi tahun n dikurangi jumlah proyek investasi tahun n-1 dibagi jumlah proyek investasi tahun n-1 dikalikan seratus persen

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagai berikut :

- a) Adanya regulasi baru terkait perizinan IMB melalui sistem aplikasi PBG, dan perizinan daerah melalui OSS RBA;
Adanya peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, Adanya Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- b) Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha/perusahaan untuk melaporkan LKPM mengakibatkan capaian kinerja kurang maksimal;
Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal melalui LKPM, sehingga kegiatan penanaman modal belum semuanya tercatat/terdata.
- c) Kurangnya penggalian potensi yang ada selain sektor pariwisata; Kegiatan yang mendukung tersedianya Potensi investasi dalam satu tahun hanya satu kali kegiatan, sehingga potensi investasi yang ada belum semuanya tersajikan dengan baik dalam bentuk buku/dokumen.
- d) Kawasan untuk berusaha banyak berada di Kawasan Rob;
Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, Kawasan Industri banyak berada di daerah rob.

Solusi/penyelesaian permasalahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa datang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak antara lain :

1. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memperoleh perizinan, dengan adanya tenaga pendamping dalam pelayanan perizinan melalui OSS RBA dan SI INVEST;
2. Mendorong pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usaha ketika melakukan pengawasan lapangan, memasifkan klinik LKPM, melakukan Koordinasi dengan BKPM RI;
3. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait (Bappeda) perihal kajian potensi, sehingga dapat dimasukkan dalam *investment challenge/Central Java Investment Business Forum (CJIBF)* menjadi *Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO)* agar dilaksanakan sesuai dengan standar dan panduan penyusunan peluang proyek investasi yang berkualitas (sedang dirumuskan oleh BKPM RI);
4. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait perihal penanganan rob;

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk melakukan review terhadap rancangan awal RKPD, dalam setiap kegiatan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak senantiasa mengikuti perkembangan proses perencanaan yang ada baik di tingkat musrenbang kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten serta pembahasan-pembahasan proses perencanaan di Bappelitbangda Kabupaten Demak.

Setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, program dan kegiatan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD, terdapat 1 (satu) subkegiatan yang pada rancangan awal RKPD terangkan, tetapi pada hasil analisis kebutuhan tidak dianggarkan. Hal ini dikarenakan sub kegiatan Dukungan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD telah teranggarkan pada sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pagu anggaran pada Rancangan awal RKPD sebesar Rp7.073.506.983,00 menjadi Rp6.527.090.200,00 pada hasil analisis kebutuhan, terdapat penurunan pagu anggaran sebesar Rp546.416.783,00.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	35.000.000	
2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	4.004.481.983	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	4.408.207.200	
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.749.081.983	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.149.708.000	

2	1	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	255.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	258.499.000	
2	1	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi	2 laporan	3.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi	2 laporan	3.500.000	
2	1	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.500.000	
2	1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	325.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	221.804.000	
2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.000.000	
2	1	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	240.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	240.000.000	
2	1	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	55.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-	

2	1	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	401.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	292.227.400	
2	1	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.224.500	
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.250.000	
2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	3.752.900	
2	1	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.000.000	

2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	160.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	150.000.000	
2	1	0	2	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4250 Dokum	14.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4250 Dokum	14.000.000	
2	1	0	2	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	
2	1	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	5 unit	335.025.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	5 unit	-	
2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60.425.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	
2	1	0	2	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	
2	1	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	203.600.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	

2	1	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
2	1	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	125.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	223.300.000	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.300.000	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000	
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	71 unit	295.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	71 unit	384.431.492	

2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	68.481.000	
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	79.363.000	
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	30.000.000	
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	33.900.000	
2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	99.000.000	
2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	31.219.000	

2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	42.468.492	
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	3.200.000.000 .000	185.000.000	PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	3.200.000.000 .000	34.607.000	
2	1	0	2	0	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan dan pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	1 dokumen	40.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah penetapan dan pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	1 dokumen	-	
2	1	0	2	0	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	40.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	-	
2	1	0	2	0	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah peta potensi investasi kabupaten/ kota	174 Dokumen	145.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah peta potensi investasi kabupaten/ kota	174 Dokumen	34.607.000	
2	1	0	2	0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	

2	1	0	2	0	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	174 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	174 Dokumen	34.607.000	
2	1	0			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rasio promosi terhadap jumlah investor	0,64 Angka	250.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rasio promosi terhadap jumlah investor	0,64 Angka	74.043.000	
2	1	0	2		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	3 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	3 Laporan	74.043.000	
2	1	0	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	74.043.000	
2	1	0	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan	1 Dokumen	-	
2	1	0			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	6850 Ketetapan	365.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	6850 Ketetapan	125.104.608	

2	1	0	2			Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	6850 ketetapan	365.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	6850 ketetapan	125.104.608		
2	1	0	2	0	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6850 Pelaku Usaha	275.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6850 Pelaku Usaha	90.158.608	
2	1	0	2	0	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	40.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	22.157.000	

2	1	0	2	0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	50.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	12.789.000	
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah investor (PMDN/PMA)	470 Proyek/investor	485.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah investor (PMDN/PMA)	470 Proyek/investor	621.385.500	
2	1	0	2	0	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	9 %	485.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	9 %	621.385.500	
2	1	0	2	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha.	75.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha.	92.062.000	

2	1	0	2	0	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	260.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	330.011.500	
2	1	0	2	0	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	150.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	199.312.000	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	300 Data	204.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	300 Data	78.480.000	

2	1	0	2	0	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia	102 data	204.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia	102 data	78.480.000		
2	1	0	2	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	102 Dokumen	204.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	102 Dokumen	78.480.000		
TOTAL									7.073.506.983	TOTAL					6.527.090.200	

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak ada program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025 – 2029 adalah penguatan fondasi transformasi social; ekonomi; tata Kelola; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan social budaya dan ekologi. Pada rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Tema Pembangunan Pulau Jawa adalah Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Sedangkan Tema Pembanguna Jawa Tengah adalah Penumpu Ketahanan Pangan dan Rantai Nilai Industri Nasional.

Isu strategis Jawa Tengah yang utama adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah jika dibandingkan tingkat nasional dan provinsi lain, terutama di Jawa dan Bali. Isu kesejahteraan masyarakat tersebut terkait dengan isu perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Dalam RPD Tahun 2024-2026 dirumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah adalah: 1) Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2) Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; 3) Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta 4) Tata kelola pemerintahan yang dinamis. Selanjutnya, berdasarkan isu strategis tersebut dan tetap memperhatikan berbagai kebijakan nasional dan amanat regulasi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Sampai

dengan tahun 2026, tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah diarahkan pada "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari". Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu: 1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; 3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki tugas untuk mendukung dan melaksanakan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2021 – 2026. Visi bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2021 – 2026 adalah "Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera". Sedangkan misi yang didukung dan dilaksanakan adalah misi ke-1 (satu) "Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Serta Kehidupan Bermasyarakat Yang agamis, Kondusif dan Berbudaya" dan misi ke-3 (tiga) "Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran", dengan program unggulan Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis " Smart City" dengan rencana implemtasi Mal Pelayanna Publik dan Program unggulan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dengan rencana implementasi peningkatan investasi dan kemudahan perijinan usaha mikro.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan terwujud dalam jangka waktu lima tahun ke depan atau pada saat masa Renstra berakhir. Sedangkan sasaran, kondisi yang diharapkan terwujud dalam jangka waktu 1 tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah :

1. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal dengan target 91,4;

- 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu indikatornya Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target 81,5;
 - 3) Meningkatkan penanaman modal daerah indikatornya Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA dengan target 1.760 proyek.
2. Sasaran
- 1) Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif, 2 (dua) indikator :
 - a). Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target 90%;
 - b). Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha dengan target 1 hari;
 - 2) Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu indikatornya Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dengan target 100%;
 - 3) Meningkatnya Nilai Investasi indikatornya Persentase Peningkatan Investasi dengan target 0,05.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan digunakan :

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- b. Visi, Misi dan program unggulan Bupati dan wakil Bupati terpilih yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Demak.
- c. Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak telah disesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum di dalam Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada Tahun 2025 melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.527.090.200,00.

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan:

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan:

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan:

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan:

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan:

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Mebel
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan:

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- a) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal
Kegiatan:
 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan:
 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha Berbasis Resiko.
 - c) Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha Berbasis Resiko.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (sumber dana dari DAU dan DAK non fisik)
Kegiatan:
 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan:
 - a) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
 - b) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
 - c) Pengawasan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan:
 1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Rumusan program dan kegiatan diatas telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, tetapi pagu indikatif mengalami perubahan penurunan atau kenaikan pada masing masing program dan kegiatan.

Adapun rencana Program dan kegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif dapat diuraikan secara detail pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TAR GET 2024	PAGU INDI KAT IF (Rp)	LOKA SI	SUM BER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKA T IF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						5.730.856.500						6.527.090.200		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						742.936.500							933.620.108	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						742.936.500							933.620.108	

1	2.18.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN IKLIM PENANAM AN MODAL	Jumlah nilai investasi (PMDN/ PMA)	5.260.000.000 rupiah	3.097.623.470.000 Rupiah	3.200.000.000 0 Rupiah	3.200.000.000 0.000 Rupiah	30.875.000						3.200.000.000 0.000 Rupiah	34.607.000	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah potensi investasi yang diterbitkan	870 Dokumen	174 Dokumen	174 Dokumen	174 Dokumen	30.875.000			1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	174 Dokumen	34.607.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	870 Dokumen	174 Dokumen	174 Dokumen	174 Dokumen	30.875.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	174 Dokumen	34.607.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAM AN MODAL	Rasio promosi terhadap jumlah investor	0,57 Angka	0,39 Angka	0,66 Angka	0,64 Angka	98.150.000						0,17 Angka	74.043.000	

2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	14 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	98.150.000			1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	3 Laporan	74.043.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	14 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	98.150.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	3 Dokumen	74.043.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	33.750 Ketetapan	6324 Ketetapan	6650 Ketetapan	6750 Ketetapan	141.555.000						6850 Ketetapan	125.104.608	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	33.750 ketetapan	6324 ketetapan	6650 ketetapan	6750 ketetapan	141.555.000			1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	6850 ketetapan	125.104.608	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	33.750 ketetapan	6324 ketetapan	6650 ketetapan	6750 Pelaku Usaha	111.0 04.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	6850 ketetapan	90.158.608	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
		Jumlah Pelaku usaha yang Diperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	19.66 3.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	22.157.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	205 Kegiatan Usaha	53 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	10.888.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	12.789.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA)	2.375 Proyek / investor	519 Proyek / investor	450 Proyek/ investor	470 Proyek / investor	363.356.500						1.760 Proyek / investor	621.385.500	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	11 %	8 %	8 %	9 %	363.356.500			1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	10 %	621.385.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	175 Kegiatan Usaha.	26 Kegiatan Usaha.	25 Kegiatan Usaha.	25 Kegiatan Usaha.	15.900.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	25 Kegiatan Usaha.	92.062.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	212.674.500	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	330.011.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.18. 05.2. 01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	325 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	134.782.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	50 Kegiatan Usaha	199.312.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	2.18. 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	1500 Data	386 Data	300 Data	300 Data	109.000.000						300 Data	78.480.000	

2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/ kota yang tersedia	510 data	125 data	102 data	102 data	109.000.000			1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	102 data	78.480.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	510 data	125 data	102 Dokumen	102 Dokumen	109.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Pelaku Usaha	102 Dokumen	78.480.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	NON URUSAN						4.987.920.000							5.593.470.092	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.987.920.000							5.593.470.092	

1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	4.987.920.000					100 % 100 %	5.593.470.092		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	32 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	60.000.000			1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	8 Dokumen	60.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan penguatan inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	10.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	2 Dokumen	7.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.0 1.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	2 Dokumen	7.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.0 1.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	35.000.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	3 Laporan	35.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.797.856.500			1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	4.408.207.200	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/bulan	26 Orang/bulan	22 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.498.033.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	28 Orang/bulan	4.149.708.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	299.823.500	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	11 Dokumen	258.499.200	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang sudah direkonsiliasi	8 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	3.500.000			1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	2 laporan	3.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.500.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	2 Laporan	3.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	178.200.000			1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastuktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	100 %	221.804.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.200.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastuktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Paket	40.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.0 1.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	36 Orang	40 Orang	120.000.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	40 Orang	181.804.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.0 1.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		50 Orang	50 Orang	33.000.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	264.512.900			1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastuktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	100 %	292.227.400	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.224.500,00	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastuktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Paket	4.224.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.0 1.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.00 0.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Paket	45.000. 000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.0 1.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.00 0.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Paket	30.000. 000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	41.250.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Paket	41.250.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.0 1.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	138 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	30 Dokumen	3.750.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	30 Dokumen	3.752.900	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Laporan	4.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635 Laporan	110 Laporan	110 Laporan	125 Laporan	123.088.400	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	150 Laporan	150.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18. 01.2. 06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000 Dokumen	4000 Dokumen	4000 Dokumen	4250 Dokumen	13.200.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	4250 Dokumen	14.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	60 unit	12 unit	12 unit	5 unit	137.452.000			1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit	95 Unit	10 Unit	30 Unit	93.324.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	44.128.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	223.300.000			1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infra struktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	100 %	223.300.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.300.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infra struktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	12 Laporan	3.300.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	12 Laporan	220.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	340 unit	56 unit	61 unit	71 unit	323.098.600			1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	76 unit	384.431.492	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

2.18.0 1.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	59.85 8.400	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Unit	68.481.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.0 1.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	17 Unit	19 Unit	20 Unit	75.88 2.200	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	20 Unit	79.363.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.0 1.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel															
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit			5 Unit	5.000 .000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	2 Unit	30.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18. 01.2. 09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit		40 Unit	50 Unit	30.48 0.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	50 Unit	33.900.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.800.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Unit	99.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.0 1.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	22.278.000	Kab. Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	5 Unit	31.219.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18. 01.2. 09.00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	47 Unit	40 Unit		1 Unit	28.80 0.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas per ekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Unit	42.468. 492	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
J U M L A H							5.730 .856. 500						6.527. 090.20 0		

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Adapun rencana Program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2024

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI S.D 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	KETERANGAN
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'												
F	Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik	unit	n/a	30		30		30		30		Melebihi
1	Koordinasi dan Monev MPP	Jumlah kegiatan koordinasi dan monev MPP	Kegiatan	n/a	4	20.000.000	2	10.000.000	2	10.070.000	4	2.18.01.2.06.09	Tercapai
2	Pengadaan mebelair MPP	Jumlah mebeler	Paket	n/a	-	-	-	-	-	-	-	2.18.01.2.07.05	Tercapai
3	Pengadaan peralatan MPP	Jumlah peralatan	Unit	n/a	-	-	-	-	-	-	-	2.18.01.2.07.06	Tercapai
8	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT												
A	Peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi	%	0,22	2,23	237.953.347	0,04	262.754.000	0,05	239.847.000	0,06		Melebihi
1	Promosi investasi	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi	Laporan	3	3	108.757.547	3	98.150.000	3	74.043.000	3	2.18.03.2.01.02	Tercapai

2	Insentif investasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	Kegiatan Usaha	n/a	-	-	-	-	-	-	1	2.18.02.2.01.02	Tercapai
3	Monitoring dan evaluasi investasi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan money	Pelaku usaha	100	255	129.195.800	250	164.604.000	250	165.804.000	250	2.18.05.2.01.03	Melebihi
g	Kemudahan perizinan usaha mikro	Persentase pengajuan izin usaha mikro yang diterbitkan	%	n/a	100	105.922.500	90	177.829.500	90	177.329.500	90		Melebihi
1	Sosialisasi perizinan usaha mikro	jumlah pelaku UMK yang mendapatkan sosialisasi	UMK	35	120	105.922.500	100	177.829.500	100	177.329.500	100	2.18.05.2.01.02	Melebihi

BAB V

PENUTUP

7.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja (Renja) merupakan Rencana Tahunan sebagai turunan dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja (Renja) memberikan gambaran yang lebih detail mengenai tujuan dan sasaran pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak akan melaksanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan untuk mencapai sasara dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan harapan seluruh Program dan Kegiatan tersebut dapat direalisasi secara baik sesuai apa yang telah direncanakan.

7.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program pembangunan di Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan berkewajiban melaksanakan program - program Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan publik;
3. Pada Awal tahun anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2023, serta kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD Kabupaten Demak;

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappelitbangda Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.3 Rencana Tindak Lanjut

Adapun Rencana Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2025, dibidang penanaman modal guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memperoleh perizinan, dengan adanya tenaga pendamping dalam pelayanan perizinan melalui OSS RBA dan SI INVEST;
2. Mendorong pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usaha ketika melakukan pengawasan lapangan, memasifkan klinik LKPM, melakukan Koordinasi dengan BKPM RI;
3. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait (Bappeda) perihal kajian potensi, sehingga dapat dimasukkan dalam *investment challenge/Central Java Invesment Bussines Forum (CJIBF)* menjadi *Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO)* agar dilaksanakan sesuai dengan standar dan panduan penyusunan peluang proyek investasi yang berkualitas (sedang dirumuskan oleh BKPM RI);
4. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait perihal penanganan rob;

Dengan telah tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap Program dan kegiatan serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dan dipedominya untuk meningkatkan Kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lampiran 1.

HASIL PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026 DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG LINSILIP	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG LINSILIP	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN /KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				X	X X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persentase	X	X X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persentase
							Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	Persentase								Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	Persentase

2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	X	X	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen
2	18	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	X	X	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
2	18	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	X	X	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
2	18	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA--SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	X	X	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA--SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
2	18	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	X	X	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan

2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	X	X	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen
2	18	01	2.02	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	X	X	01	2.02	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
2	18	01	2.02	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	X	X	01	2.02	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang sudah direkonsiliasi	Laporan	X	X	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang sudah direkonsiliasi	Laporan
2	18	01	2.03	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	X	X	01	2.03	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase	X	X	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase
2	18	01	2.05	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	X	X	01	2.05	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
2	18	01	2.05	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	X	X	01	2.05	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang

2	18	01	2.05	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	X	X	01	2.05	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	X	X	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase
2	18	01	2.06	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	X	X	01	2.06	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
2	18	01	2.06	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	X	X	01	2.06	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
2	18	01	2.06	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	X	X	01	2.06	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
2	18	01	2.06	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	X	X	01	2.06	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
2	18	01	2.06	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	X	X	01	2.06	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen
2	18	01	2.06	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	X	X	01	2.06	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan

2	18	01	2.006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	X	X	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
2	18	01	2.006	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	X	X	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
2	18	01	2.006	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	X	X	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
2	18	01	2.007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan	Unit	X	X	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan	Unit
2	18	01	2.007	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	X	X	01	2.07	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
2	18	01	2.007	00	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	X	X	01	2.07	00	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
2	18	01	2.007	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	X	X	01	2.07	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit

2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	X	X	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	X	X	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persentase	X	X	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persentase
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	X	X	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	X	X	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Unit	X	X	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Unit

2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	X	X	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	X	X	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	X	X	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	X	X	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	X	X	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	X	X	X	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	X	X	X	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rupiah

2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan dan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	dokumen	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan dan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	dokumen
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	18	02	2.01	00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	2	18	02	2.01	00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	18	02	2.02	00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

2	18	02	202	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rasio promosi terhadap jumlah investor	Angka	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rasio promosi terhadap jumlah investor	Angka
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Laporan	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Laporan
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	Ketetapan	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	Ketetapan

2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	Ketetapan	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	Ketetapan
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah investor (PMDN/PMA)	Proyek / investor	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah investor (PMDN/PMA)	Proyek/ investor
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang telah dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang telah dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%

2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha.	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha

2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	Data	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	Data
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia	Data	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia	Data
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	18	06	2.01	00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen